



Saefullah Serahkan APBD Ke Kemendagri

SEKRETARIS Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengaku belum mengetahui soal pelaksanaan hak Angket oleh DPRD DKI Jakarta. Menurut dia, kini Pemprov DKI Jakarta telah mengirimkan kelengkapan berkas draf APBD 2015 yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Yang dipersyaratkan mereka (Kemendagri) kemarin, hanya masalah teknis. Ada empat yang sudah diperbaiki. Jadi hari ini kita sudah lengkap dan diserahkan," ujar dia usai rapim di Balaikota, kemarin (16/2).

Ia mengatakan, kini menunggu persetujuan Kemendagri setelah Pemprov DKI melengkapi berkas-berkas draf APBD DKI 2015. "Harapan kita bulan ini. Seminggu ke depan seharusnya sudah ya. Kita tunggu saja dari Kemendagri. Ini sudah sesuai aturan mereka. Ini persoalan teknis aja kok, kemarin karena ketidaklengkapan. Itu lampiran-lampiran sudah dilengkapin. Gak ada masalah lagi," ungkap Saefullah.

Mantan Walikota Jakarta Pusat ini memastikan mengirimkan kelengkapan berkas APBD DKI 2015 yang diminta oleh Kemendagri. Ia mengungkapkan, telah mengirimkan sebanyak empat bundel yang berisi rekomendasi dari hasil sidang komisi-komisi di DPRD DKI. "Sebetulnya apa yang direkomendasi dari setiap komisi yang ditandatangani oleh komisi laporan kepada ketua DPRD, itu sudah terakomodir," ungkap dia.

Akan tetapi, sambung Saefullah, Pemprov DKI tidak bisa mengakomodir bila hingga satuan ketiga. "Kami mengacu pada surat edaran dari Kemendagri bahwa DPR pusat, DPRD tingkat satu maupun tingkat dua tidak boleh masuk pada satuan ketiga. Satuan ketiga berisi program-program. Gak bisa sampai ke situ. Jadi kalau soal kebijakan, itu semua sudah



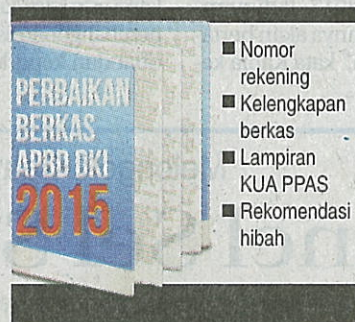
DOK/INDOPOS

Saefullah

kita tampung," tutur dia.

Pemprov DKI juga telah mengantongi rekomendasi dari Ketua DPRD yang berisi usulan dari kelima komisi di dewan. "Usulan yang dibahas di kelima komisi sudah kita tampung, masuk semua. Tapi, sekali lagi tidak sampai kepada satuan ketiga," beber Saefullah.

Saefullah menegaskan, Pemprov DKI mengajukan surat ke Kemendagri soal anggaran. Bahkan Kemendagri tidak mempermasalahkan soal penerapan sistem e-budgeting oleh Pemprov DKI. "Selanjutnya, hasil rekomendasi dari Mendagri akan kita sampaikan kepada dewan. Jadi tidak ada paripurna lagi. Ga ada masalah. Formatnya tidak ada masalah," pungkas dia. (wok)



- Nomor rekening
- Kelengkapan berkas
- Lampiran KUA PPAS
- Rekomendasi hibah

GIMBAL/INDOPOS